

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA BOHAR KECAMATAN
TAMAN KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

IKA ARSA RAMADIANA

NIM : G72216037



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI AKUNTANSI

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ika Arsa Ramadiana

NIM : G72216037

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

Judul Skripsi : Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Ika Arsa Ramadiana

NIM. G72216037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ika Arsa Ramadiana NIM. G72216037 ini telah diperiksa dan telah disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Februari 2020

Pembimbing,



Hastanti Agustin Rahayu, SE, M.Acc, Ak, CA, BKP

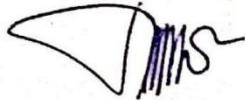
NIP. 198308082018012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ika Arsa Ramadiana NIM. G72216037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 03 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

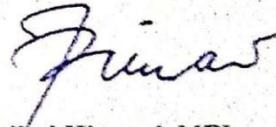
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Hastanti Agustin Rahayu, SE, M.Acc
NIP. 198308082018012001

Penguji II,



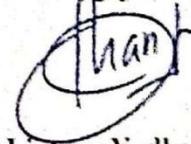
Fatikul Himami, MEI
NIP. 198009232009121002

Penguji III,



Imam Buchori, SE, M.Si
NIP. 196809262000031001

Penguji IV



Ashari Lintang Yudhanti, M.Ak
NIP. 199411082019032021

Surabaya, 11 Maret 2020

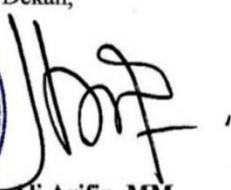
Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




D. H. An. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212141993031002

mengacu pada dokumen RPJMDes dan RKPDes, dalam perencanaan tersebut sudah ditetapkan melalui musyawarah, tetapi masih ada beberapa catatan dalam perencanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa, hanya saja masih terdapat prosentase yang tidak berimbang dalam penyerapannya yaitu sebesar 96,44 untuk pembangunan dan 3,56% untuk pemberdayaan masyarakat desa.¹²

Persamaan dari penelitian ini ialah peneliti sama-sama meneliti dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa dan metode penelitian yang sama yakni kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah peneliti terdahulu juga meneliti implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, peneliti sekarang tidak. Objek yang digunakan peneliti sekarang juga berbeda.

Penelitian oleh Arif Sofianto dengan judul penelitian “Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah masyarakat dan pemerintah desa merasa sangat terbantu dengan adanya dana desa. Pelaksanaan dana desa di Kecamatan Kajen Desa Nyamok dan Desa Tanjungsari diarahkan untuk terfokus dalam infrastruktur yang digunakan dalam memperlancar arus transportasi seperti jalan. Tetapi kapasitas perangkat desa serta masyarakat masih belum sepenuhnya memahami

¹² Ummi Mahbubah, Suparno, dan Subarkah. “Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (*Best Practice* di Desa Kancilan Tahun 2017)”. *Jurnal Suara Keadilan*. Vol 19, No. 2 (2018).

dari adanya implementasi dana desa. Objek penelitian yang digunakanpun juga berbeda.

Penelitian oleh Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, Jaka Winarna dengan judul penelitian “Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan implementasi dana desa dari sisi proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan dapat lebih diberdayakan lagi. Jika dari dana anggaran desa yang semakin besar dapat memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika itu berjalan sejalan, maka akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan desa.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang dana desa dan metode penelitian yang digunakan juga sama yakni kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini ialah peneliti sekarang meneliti implementasi dana desa yang difokuskan dalam meningkatkan pembangunan dan juga peneliti sekarang akan meneliti dampak ekonomi dari adanya pembangunan tersebut. Objek penelitian yang digunakan juga berbeda.

¹⁵Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, Jaka Wirana. “Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri”.*Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol.16, No.1 (2016).

Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes. Penyaluran dana dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD, selanjutnya dari kabupaten/kota disalurkan ke desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKDes. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- Tahap I sebesar 40% di bulan April
- Tahap II sebesar 40% di bulan Agustus
- Tahap III sebesar 20% di bulan November

Besaran alokasi anggaran yang diberikan langsung kepada desa terdapat ketentuannya yakni 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan angka kemiskinan harus dihitung dengan bobot:

- 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan kontruksi. Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagai faktor penggali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan

- Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yaitu berupa bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW;
- Operasional pemerintah desa.

Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT/RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa.”

Penggunaan dana desa harus diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan seperti itu pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok kegiatan dan jenis. Klasifikasi belanja desa berdasarkan kelompok terdiri dari:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan antar permukiman;
 - c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengairan, listrik, dan telekomunikasi.
- 2) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, dengan melalui strategi:
- a. Mendorong perekonomian desa dan meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana produksi khusus;
 - b. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa.
- 3) Pembangunan Sumber Daya Manusia, meningkatkan Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa, dengan melalui strategi:
- a. Mengembangkan pendidikan dengan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
 - b. Mengembangkan peran aktif masyarakat;
 - c. Penguatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. Meningkatkan kapasitas kesadaran masyarakat.
- 4) Penguatan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, melalui strategi:
- a. Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa;
 - b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat;

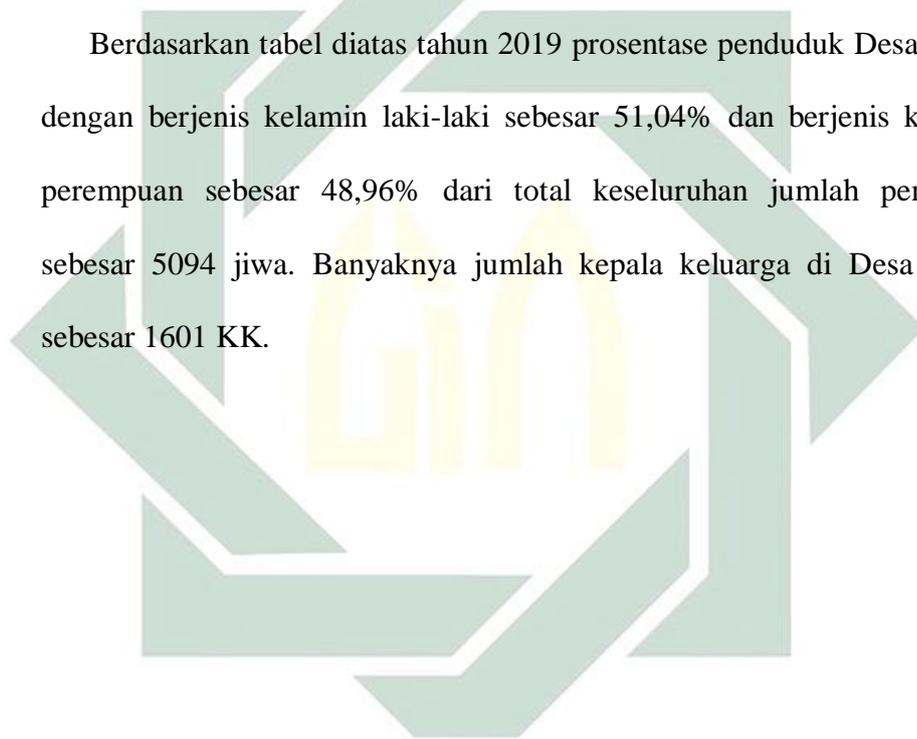
4. Informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesehatan masyarakat; dan
 2. Pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran; dan
 3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesiagaan menghadapi bencana alam;
 2. Penanganan bencana alam;
 3. Pelestarian lingkungan hidup; dan
 4. Penanganan kejadian luar biasa lainnya.

Tabel 3.4
Jumlah Kepala Keluarga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Uraian | Jumlah |
|------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Laki-laki | 2600 jiwa |
| 2 | Perempuan | 2494 jiwa |
| Jumlah Penduduk | | 5094 jiwa |
| Jumlah Kepala Keluarga | | 1601 KK |

Sumber: dari Profil Desa/Kelurahan Bohar Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas tahun 2019 prosentase penduduk Desa Bohar dengan berjenis kelamin laki-laki sebesar 51,04% dan berjenis kelamin perempuan sebesar 48,96% dari total keseluruhan jumlah penduduk sebesar 5094 jiwa. Banyaknya jumlah kepala keluarga di Desa Bohar sebesar 1601 KK.



1. Musyawarah Desa (Musdes)

Musdes diselenggarakan oleh BPD. Dalam musdes dihadiri oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, PKK, dan karang taruna. Musdes akan membahas tentang pencermatan RPJMDes, menyepakati hasil Pencermatan ulang RPJMDes, dan membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan. Hasil dari musdes berupa berita acara musdes, notulen, dan daftar hadir.

2. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKPDes. Dalam pembentukan tim RKPDes dibentuk langsung oleh kepala desa dengan beranggotakan 7-11 orang. Tim tersebut terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku ketua, ketua LPMD sebagai sekretaris, dan anggotanya tim tersebut meliputi perangkat desa, LPMD, unsur masyarakat (tokoh agama/tokoh masyarakat). Hasil dari tim penyusun RKPDes berupa berita acara serta dokumen rancangan RKPDes untuk kepala desa.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musrenbangdes diselenggarakan oleh kepala desa, tujuan diadakannya musrenbangdes guna membahas dan menyepakati rancangan RKPDes yang sudah dibuat oleh tim penyusun RKPDes. Dalam musrenbangdes peserta yang hadir meliputi unsur pemerintahan desa, BPD, unsur masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama) dan turut serta mengundang anggota dewan, pihak kecamatan, satuan kerja pemerintah daerah kabupaten, pendamping desa, dan unsur masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil dari musrenbangdes berupa berita acara, notulensi, dan daftar hadir.

| No | Jenis Kegiatan | Tahun | Jumlah Kegiatan | Terealisasi | Belum/Tidak Terealisasi |
|----|--|-------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 7 | Pembangunan/pemeliharaan/rehab/sewa ponkesdes/posyandu | 2015 | 1 | 0 | 1 |
| | | 2016 | 3 | 1 | 2 |
| | | 2017 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Pembangunan/pemeliharaan/pembelian/sarana/prasarana/makam Mbah Sayyid Khasan Madinah | 2015 | 2 | 2 | 0 |
| | | 2016 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2017 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2018 | 1 | 0 | 1 |
| | | 2019 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Pemeliharaan sungai avur bulubendo | 2015 | 1 | 0 | 1 |
| | | 2016 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Pembangunan/pemeliharaan kantor dan balai desa | 2017 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2018 | 1 | 0 | 1 |
| | | 2019 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Pembangunan/perbaikan irigasi | 2017 | 2 | 0 | 2 |
| | | 2018 | 1 | 0 | 1 |
| | | 2019 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa | 2017 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2018 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2019 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Pembangunan tempat/pengolahan sampah | 2017 | 1 | 0 | 1 |
| | | 2018 | 1 | 0 | 1 |

| No | Uraian | Penerimaan/Anggaran | Pengeluaran/Realisasi | |
|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------|
| Jumlah Dilanjutkan | | Rp 256,718,005.87 | Rp 228,969,690.00 | |
| 11 | Pemb. Paving di RT 09 RW 05 (P. 92m x L.2,5m = 230m ²) | Rp 27,331,350.00 | Rp 27,331,350.00 | 100% |
| 12 | Pemb. Paving di RT 13 RW 07 (P.127m x L.2,5m = 317,5m ²) | Rp 34,049,070.00 | Rp 33,296,550.00 | 98% |
| 13 | Pemb. Paving di RT 15 RW 08 (P.100m x L.3m = 300 m ²) | Rp 40,328,500.00 | Rp 40,328,500.00 | 100% |
| 14 | Pembuatan kanopi posyandu anyelir / PAUD + paving | Rp 28,544,000.00 | Rp 27,478,000.00 | 96% |
| 15 | pemb paving di halaman posyandu anyelir/PAUD | Rp 3,172,455.00 | Rp 3,172,455.00 | 100% |
| 16 | Pemb. Saluran air di RT 01 RW 01 (P.276M1) | Rp 96,600,000.00 | Belum Terlaksana | 0% |
| 17 | Pemb. Saluran air di RT 10 RW 06 (P.45M1) | Rp 15,750,000.00 | Belum Terlaksana | 0% |
| 18 | Pemb. Paving di RT 13 RW 07 (P.26m x L.1,8m = 46,8 m ²) | Rp 6,037,540.00 | Rp 5,973,250.00 | 99% |
| 19 | Pemb. Paving di RT 15 RW 08 (P.56m x L.3m = 168 m ²) | Rp 23,016,400.00 | Rp 22,703,300.00 | 99% |
| 20 | Pemb. Paving di RT 05 RW 03 (P.30m x L.2m = 60m ²) | Rp 7,766,800.00 | Rp 7,589,150.00 | 98% |
| 21 | Pemb. Paving di RT 05 RW 03 (P.67m x L.2m = 134m ²) | Rp 15,878,320.00 | Belum Terlaksana | 0% |
| 22 | Pemb. Paving di RT 07 RW 04 (P.55m x L.2,5m = 137,5m ²) | Rp 16,366,300.00 | Belum Terlaksana | 0% |
| 23 | Pembuatan kanopi samping pendopo makam 72m ² + talang | Rp 32,500,000.00 | Rp 32,252,000.00 | 99% |
| 24 | Pemb. Dan pemeliharaan jalan paving menuju Dsn Kuwung | Rp 40,000,000.00 | Belum Terlaksana | 0% |
| 25 | Pemb. Dan pemeliharaan jalan paving menuju Dsn Kuwung | Rp 25,000,000.00 | Belum Terlaksana | 0% |
| Jumlah Dana Pembangunan | | Rp 635,009,670.87 | Rp 395,797,695.00 | 62% |
| Sisa Kas Pembangunan | | Rp 239,211,975.87 | | |

| No | Uraian | Penerimaan/Anggaran | Pengeluaran/Realisasi | Prosentase Penyerapan |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Jumlah Dilanjutkan | | Rp 435,901,220.34 | Rp 426,306,888.00 | |
| 12 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa | Rp 10,000,000.00 | Rp 9,992,500.00 | 100% |
| 13 | Pemeliharaan saluran irigasi dan daerah aliran sungai | Rp 4,000,000.00 | Rp 3,218,000.00 | 80% |
| 14 | Pembangunan dan pemeliharaan PONKESDES/Pos Yandu | Rp 24,000,000.00 | Rp 23,970,750.00 | 100% |
| 15 | Pembangunan dan pemeliharaan Posyandu Dsn Kuwung | Rp 5,000,000.00 | Rp 4,999,760.00 | 100% |
| 16 | Bantuan operasional Pos Yandu Lansia | Rp 10,800,000.00 | Rp 10,749,500.00 | 100% |
| 17 | Bantuan operasional Pos Yandu Balita | Rp 28,540,000.00 | Rp 28,539,750.00 | 100% |
| 18 | Prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | 100% |
| 19 | Prasarana pendidikan Madrasah Hidayatul Mubtadiin (MI) | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | 100% |
| 20 | Bantuan operasional Gapoktan | Rp 3,500,000.00 | Rp 3,483,200.00 | 100% |
| 21 | Pembangunan gedung pengolahan sampah (TPST) | Rp 100,000,000.00 | Rp - | 0% |
| 22 | Belanja material untuk <i>smart city</i> | Rp 60,000,000.00 | Rp 60,000,000.00 | 100% |
| 23 | Pembuatan kanopi samping balai desa + talang | Rp 34,925,000.00 | Rp 34,925,000.00 | 100% |
| 24 | Pemasangan pintu besi samping balai desa | Rp 3,300,000.00 | Rp 3,300,000.00 | 100% |
| 25 | Pengerasan jalan antar dusun Bohar-Balun | Rp 10,400,000.00 | Rp 10,375,000.00 | 100% |
| 26 | Pembangunan saluran air RT 01 RW 01 (P. 278 M1) | Rp 112,000,000.00 | Rp 111,921,000.00 | 100% |
| 27 | Pembangunan saluran air di RT 10 RW 06 (P.45 M1) | Rp 18,000,000.00 | Rp 11,590,375.00 | 64% |
| Jumlah Lanjutkan | | Rp 865,366,220.34 | Rp 748,371,723.00 | |

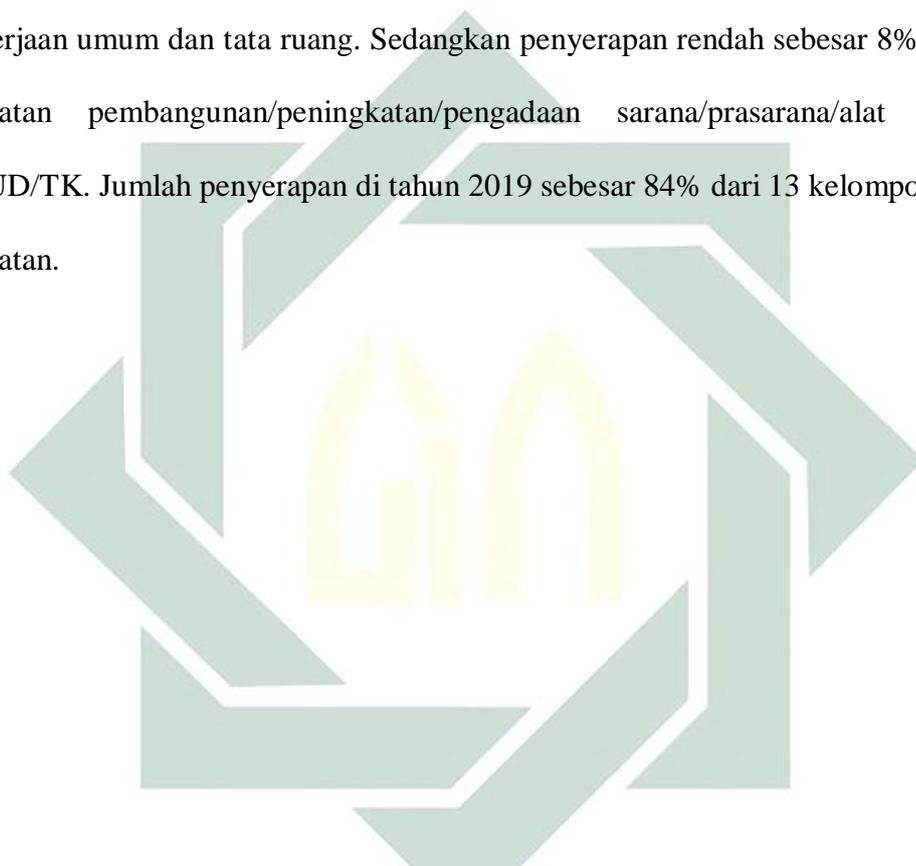
| No | Uraian Kegiatan | Anggaran RKPDes | APBDes Perubahan | | Realisasi Dana Desa | Prosentase Penyerapan |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Sebelum | Sesudah | | |
| Jumlah Dilanjutkan | | Rp 203,108,568.00 | Rp 239,704,568.00 | Rp 198,023,305.87 | Rp 171,093,010.00 | 86% |
| 10 | Pemb. Paving di RT 23 RW 04 (P.93m x L.2,5m = 232,2m ²) | Rp 46,500,000.00 | Rp 46,500,000.00 | Rp 24,645,630.00 | Rp 24,580,130.00 | 100% |
| 11 | Pemb. Paving di RT 09 RW 05 (P. 92m x L.2,5m = 230m ²) | Rp 46,000,000.00 | Rp 46,000,000.00 | Rp 27,331,350.00 | Rp 27,331,350.00 | 100% |
| 12 | Pemb. Paving di RT 13 RW 07 (P.127m x L.2,5m = 317,5m ²) | Rp 63,500,000.00 | Rp 63,500,000.00 | Rp 34,049,070.00 | Rp 33,296,550.00 | 98% |
| 13 | Pemb. Paving di RT 15 RW 08 (P.100m x L.3m = 300 m ²) | Rp 61,000,000.00 | Rp 61,000,000.00 | Rp 40,328,500.00 | Rp 40,328,500.00 | 100% |
| 14 | Pembuatan kanopi posyandu anyelir / PAUD + paving | Rp 28,544,000.00 | Rp 28,544,000.00 | Rp 28,544,000.00 | Rp 27,478,000.00 | 96% |
| 15 | pemb paving di halaman posyandu anyelir/PAUD | Rp - | Rp - | Rp 3,172,455.00 | Rp 3,172,455.00 | 100% |
| 16 | Pemb. Saluran air di RT 01 RW 01 (P.276M1) | Rp 117,000,000.00 | Rp 117,600,000.00 | Rp 96,600,000.00 | Rp - | 0% |
| 17 | Pemb. Saluran air di RT 10 RW 06 (P.45M1) | Rp - | Rp - | Rp 15,750,000.00 | Rp - | 0% |
| 18 | Pemb. Paving di RT 13 RW 07 (P.26m x L.1,8m = 46,8 m ²) | Rp 63,500,000.00 | Rp - | Rp 6,037,540.00 | Rp 5,973,250.00 | 99% |
| 19 | Pemb. Paving di RT 15 RW 08 (P.56m x L.3m = 168 m ²) | Rp 61,000,000.00 | Rp - | Rp 23,016,400.00 | Rp 22,703,300.00 | 99% |
| 20 | Pemb. Paving di RT 05 RW 03 (P.30m x L.2m = 60m ²) | Rp - | Rp - | Rp 7,766,800.00 | Rp 7,589,150.00 | 98% |
| Jumlah Lanjutan | | Rp 690,152,568.00 | Rp 602,848,568.00 | Rp 505,265,050.87 | Rp 363,545,695.00 | 72% |

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran RKPDes | APBDes Perubahan | | Realisasi Dana Desa | Prosentase Penyerapan |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Sebelum | Sesudah | | |
| Jumlah Dilanjutkan | | Rp 376,000,000.00 | Rp 340,038,340.00 | Rp 358,088,340.34 | Rp 357,653,998.00 | 100% |
| 10 | Pembangunan Paving di RT 07 RW 04 (P 93M x L 3M = 279M) | Rp 44,640,000.00 | Rp 40,389,440.00 | Rp 40,389,440.00 | Rp 37,640,185.00 | 93% |
| 11 | Pembangunan paving di RT 05 RW 03 (P 108M x L.2M = 216M) | Rp - | Rp 35,423,440.00 | Rp 35,423,440.00 | Rp 31,012,705.00 | 88% |
| 12 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa | Rp 15,000,000.00 | Rp 10,000,000.00 | Rp 10,000,000.00 | Rp 9,992,500.00 | 100% |
| 13 | Pemeliharaan saluran irigasi dan daerah aliran sungai | Rp 3,500,000.00 | Rp 4,000,000.00 | Rp 4,000,000.00 | Rp 3,218,000.00 | 80% |
| 14 | Pembangunan dan pemeliharaan PONKESDES/Pos Yandu | Rp 25,000,000.00 | Rp 23,000,000.00 | Rp 24,000,000.00 | Rp 23,970,750.00 | 100% |
| 15 | Pembangunan dan pemeliharaan Posyandu Dsn Kuwung | Rp - | Rp 5,000,000.00 | Rp 5,000,000.00 | Rp 4,999,760.00 | 100% |
| 16 | Bantuan operasional Pos Yandu Lansia | Rp - | Rp 10,800,000.00 | Rp 10,800,000.00 | Rp 10,749,500.00 | 100% |
| 17 | Bantuan operasional Pos Yandu Balita | Rp - | Rp 28,540,000.00 | Rp 28,540,000.00 | Rp 28,539,750.00 | 100% |
| 18 | Prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) | Rp 3,000,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | 100% |
| 19 | Prasarana pendidikan Madrasah Hidayatul Mubtadiin (MI) | Rp 3,000,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,500,000.00 | 100% |
| 20 | Bantuan operasional Gapoktan | Rp 4,000,000.00 | Rp 3,500,000.00 | Rp 3,500,000.00 | Rp 3,483,200.00 | 100% |
| Jumlah Lanjutan | | Rp 474,140,000.00 | Rp 505,691,220.00 | Rp 524,741,220.34 | Rp 516,260,348.00 | 98% |

Dari data di atas penyerapan tertinggi sebesar 127% yang terjadi dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier. Tingginya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan dana realisasi kegiatan melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBDes. Untuk nilai penyerapan terendah terdapat dalam kegiatan pembangunan gedung pengolahan sampah (TPST) sebesar 0% karena kegiatan tersebut tidak terealisasi. Penyerapan terendah kedua terdapat dalam kegiatan pembangunan paving di RT 27 RW 10 sebesar 71%.

Dari semua jenis kegiatan tersebut total penyerapan anggaran di tahun 2017 sebesar 120%. Hal itu terjadi dikarenakan terdapat anggaran kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes tetapi kegiatan tersebut dapat terealisasi dengan menggunakan SiLPa Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2016.

Dari data di atas, pada tahun 2019 penyerapan tertinggi sebesar 100% terdapat dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah dan lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Sedangkan penyerapan rendah sebesar 8% dalam kegiatan pembangunan/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga PAUD/TK. Jumlah penyerapan di tahun 2019 sebesar 84% dari 13 kelompok jenis kegiatan.



setiap tahunnya. RKPDes akan mengacu pada RPJMDes yang sudah disepakati dan ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur penyusunan perencanaan pembangunan desa di Desa Bohar sudah baik dalam penyusunan RPJMDes maupun RKPDes sudah sesuai dengan teori dan peraturan dari pemerintah. Dimana alur penyusunan perencanaan pembangunan dimulai dari:

1. Musyawarah Desa (Musdes), yang diselenggarakan oleh BPD, yang dihadiri oleh LPMD/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, RT/RW, PKK, dan juga Karang Taruna. Pembahasan Musdes meliputi pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang RPJM Desa, dan membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan. Dari adanya Musdes hasil berupa langsung dibentuknya tim penyusun RKPDes dan daftar hadir.
2. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKPDes, pembentukan tim penyusunan RKPDes dibentuk langsung oleh kepala desa bersamaan dengan musdes untuk mempersingkat waktu dan biaya yang dikeluarkan. Tim beranggotaan 7 - 11 orang. Di Desa Bohar setiap tahunnya untuk tim penyusun RKPDes sebanyak 11 orang yang terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku ketua, ketua LPMD sebagai sekretaris, anggota yang meliputi perangkat desa, LPMD, unsur masyarakat (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama). Hasil dari pembentukan tim penyusunan RKPDes

ini berupa berita acara serta dokumen rancangan RKPDes beserta anggarannya untuk kepala Desa.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penyelenggara dari musrenbangdes adalah kepala desa. musrenbangdes diadakan guna membahas dan menyepakati rancangan RKPDes yang sudah dibuat oleh Tim penyusun RKPDes. Peserta yang hadir meliputi unsur pemerintah desa, BPD, Unsur masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama), dan turutserta mengundang anggota dewan, pihak kecamatan, satuan kerja pemerintah daerah kabupaten, pendamping desa, dan unsur masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Rancangan RKPDes memuat: empat bidang, prioritas program dan kegiatan yang didanai. Hasil dari Musrenbangdes ini berupa berita acara yang berisikan apa saja prioritas pembangunan, notulen gabung menjadi satu dengan berita acara, dan daftar hadir.
4. Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes), di Desa Bohar untuk penyusunan APBDes mengacu kedalam RKPDes yang sudah ditetapkan sebagai pedoman dalam penganggarannya.

Sebelum proses penyusunan perencanaan berlangsung, pihak pemerintah desa terutama sekretaris desa memberikan sejenis belangko untuk setiap RT/RW, agar dapat menyaring usulan serta aspirasi yang dibutuhkan oleh warganya, baik itu berupa pembangunan maupun

Pada tahun 2015 terdapat 24 kegiatan rencana pembangunan desa didalam RKPDes. Sebanyak 10 kegiatan dari RKPDes, 5 kegiatan tidak ada dalam RKPDes yang dapat terealisasi dan masih terdapat 14 kegiatan yang terdapat RKPDes belum terealisasi. Hal tersebut dikarenakan adanya prioritas pembangunan. Pada tahun 2016 terdapat 21 kegiatan rencana pembangunan dalam RKPDes. Sebanyak 11 kegiatan yang dari RKPDes dan 7 Kegiatan tidak ada dalam RKPDes dan terdapat 10 kegiatan dalam RKPDes yang belum terealisasi. 7 Kegiatan yang tidak ada dalam RKPDes tersebut merupakan kegiatan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya dan baru dapat terealisasi pada tahun berikutnya. Hal tersebut dikarenakan adanya skala prioritas dan sudah berakhirnya masa pada tahun tersebut.

Sama halnya dengan tahun 2015 dan tahun 2016, tahun 2017 hingga tahun 2019 tidak seluruhnya rencana kegiatan pembangunan yang terdapat di RKPDes terealisasi. Hal tersebut dikarenakan masih adanya pembangunan yang belum terealisasi ditahun sebelumnya, maka harus direncanakan kembali diRKPDes tahun yang akan datang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah yang sudah diadakan meningkat didua tahun terakhir yakni tahun 2018 dan tahun 2019. Untuk tahun 2015 tidak terdapat lampiran daftar hadir peserta musyawarah didalam RPKDes. Tahun 2016 hingga tahun 2017 sudah terdapat lampiran daftar hadir peserta musyawarah di dalam RKPDes

Hasil penelitian menemukan dari tahun 2015-2019 prosentase penyerapan anggaran dalam bidang pembangunan terendah adalah tahun 2016 sebesar 62% dan hal tersebut diperbolehkan. Tahun 2015, 2017, 2018, 2019 prosentase penyerapan anggaran untuk pembangunan diatas 70%, hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Sekretaris desa menyampaikan bahwa dana desa sebesar 70% untuk pembangunan dan 30% untuk memberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan menteri dan peraturan kabupaten.

Terjadinya prosentase penyerapan anggaran dalam pembangunan desa diatas 70% dikarenakan prioritas kegiatan. Apabila daerah tersebut tidak segera dibangun maka masyarakat sekitar wilayah tersebut terkena imbasnya. Misalnya, wilayah tersebut tidak dipaving apabila hujan jalan akan menjadi becek dan banjir, maka masyarakat sekitar akan terganggu dan menyebabkan aktivitas terbengkalai.

Hasil penelitian menemukan bahwa setiap tahunnya masih terdapat kegiatan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa tetapi belum atau tidak terlaksana. Kegiatan yang belum terealisasi akan terealisasi pada tahun-tahun yang akan datang. Berikut analisa anggaran kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan tahun anggarannya.

dimana kenaikan anggaran untuk kegiatan tersebut mengalami kenaikan sebanyak 9% dan 33%. Naiknya anggaran ditahun realisasi dikarenakan, panjang saluran yang harus dibangun, serta belanja material yang naik dan juga jasa upah tenaga kerja yang semula hanya dikerjakan 2-3 orang pekerja saja harus dikerjakan 4-5 orang pekerja. Kegiatan pembangunan saluran air selesai di tahun 2016, karena untuk tahun selanjutnya tidak ada lagi kegiatan pembangunan saluran air melainkan hanya pemeliharaan saluran air.

Pada tahun 2016 terdapat 7 kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2016. Hal itu dikarenakan dana desa turun terlambat, apabila kegiatan pembangunan dipaksakan dibangun di akhir tahun tidak akan memungkinkan. Maka dari itu kegiatan tidak dilakukan tetapi akan tetap dianggarkan atau direncanakan dalam RKPDes ditahun yang akan datang dengan melihat skala prioritas dari pembangunan tersebut.

Di kegiatan pembangunan paving di RT 07 RW 04 tahun 2016 terdapat kenaikan alokasi anggaran yang terealisasi di tahun 2017 sebesar 147% dengan prosentase penyerapan sebesar 93%. Hal tersebut dikarenakan adanya panjang wilayah yang dibangun mengalami penambahan. Dengan bertambahnya wilayah yang dibangun maka bahan material dan jasa upah tenaga kerja juga bertambah.

Berdasarkan Konsep *Best Value* dimana konsep tersebut mengukur berdasarkan indikator *outcome* (hasil). Tahun 2015-2019 mencapai hasil prosentase terealisasi kegiatan yang berbeda-beda. Dimana hasil yang baik didapatkan di tahun 2018 dan 2019 karena hasil dari kegiatan yang direncanakan terealisasi semua.

Dari penggunaan pengukuran diatas maka dapat dilihat dari kegiatan yang telah direncanakan dan banyaknya kegiatan yang terealisasi dapat menimbulkan dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari adanya implementasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan bagi desa yaitu:

1. Efektivitas berupa transportasi lancar, jalanan menjadi baik dan tidak rusak karena pemerintah desa setiap tahunnya selalu melakukan pembangunan jalan, baik berupa pavingisasi ataupun pemeliharaan jalan. Dengan lancarnya transportasi, masyarakat Desa Bohar yang memiliki usaha (pelaku UMKM) menjadi lebih efektif dalam proses distribusi dan pengiriman barang usahanya. Waktu yang dibutuhkan dalam hal tersebut menjadi lebih sedikit. Dengan adanya waktu yang lebih sedikit pelaku usaha dapat melakukan proses produksi dengan maksimal. Selain itu, para pemilik toko kelontong yang terletak di pinggir jalan utama dapat lebih efektif dalam hal kulakan, pemilik toko tidak perlu jauh-jauh untuk kepasar atau ke agen untuk membeli barang persediaan di tokonya, karena para pemilik toko sudah dihampiri oleh sales-sales yang melewati jalanan tersebut.

2. Ekonomi berupa hasil pertanian dapat meningkat dengan adanya pembangunan dan pemeliharaan saluran air sawah petani pada musim kemarau masih dapat melakukan panen. Awalnya para petani hanya bisa melakukan panen satu kali pada musim kemarau sekarang dapat panen dua kali. Hasil panen yang dihasilkan menjadi 2 kali lipat dikarenakan panen yang dilakukan dua kali. Setiap panen 1 Ha akan menghasilkan kurang lebih 5 ton, maka dengan dua kali panen 1 Ha bisa menghasilkan kurang lebih 10 ton. Selain itu dengan adanya hal yang sudah disebutkan diatas pada bagian efektivitas para pelaku UMKM pendapatan meningkat 20%-30% karena proses distribusi dan pengiriman barang yang membutuhkan waktu lebih sedikit sehingga dapat memaksimalkan waktu untuk produksi. Untuk toko kelontong pendapatan yang diperoleh tidak menentu dan hanya mengalami peningkatan kurang lebih 2% peningkatan terjadi dalam hal harga beli dari persediaan yang jauh lebih murah karena dihipi oleh sales. Akan tetapi, sedikitnya peningkatan pendapatan tersebut dikarenakan banyak dibukanya toko-toko kelontong yang lainnya.
3. Efisiensi berupa tata ruang yang lebih bersih dan rapi serta akses jalan lebih mudah. Tata ruang yang baik terlihat adanya rambu-rambu jalan yang dapat mempermudah mengetahui lokasi di wilayah Desa Bohar. Seperti halnya masyarakat yang melakukan usaha *online* mereka membutuhkan bantuan gojek ataupun grab untuk mengirimkan barang kepada *customer*. Dengan adanya rambu-rambu tersebut

